



Kolaborasi Personil Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Era Kurikulum Merdeka

Maulida Fitri¹, Firman², Neviyarni S³

¹²³Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 20, 2024
Revised Juni 25, 2024
Accepted Juni 30, 2024
Available online 16 July, 2024

Kata Kunci:

Manajemen BK, Kolaborasi Personil Sekolah, Kurikulum Merdeka

Keywords:

Management Concepts, Collaboration of School Personnel, Kurikulum Merdeka



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Kolaborasi antar personil sekolah sangat penting dalam pelaksanaan manajemen BK. Namun nyatanya fenomena yang terlihat dilapangan masih terdapat personil sekolah yang belum melakukan perannya masing-masing dalam pelayanan BK dengan maksimal. Seperti dukungan sarana dan prasarana yang kurang dari kepala sekolah, guru BK yang tidak membuat program dengan efektif dan efisien, dan guru bidang studi/kelas yang tidak bekejasama dalam membagi informasi mengenai pola perkembangan siswa dikelas. Dalam pelaksanaan manajemen disekolah dihimpun oleh suatu kurikulum yang disebut kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan potensi individu siswa melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan personal. Dalam konteks ini, peran bimbingan dan konseling menjadi sangat penting untuk membantu siswa mengatasi berbagai tantangan akademik dan non-akademik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kolaborasi antar personil sekolah dalam BK. Sehingga diperlukan sistem manajemen yang baik agar pelayanan BK terlaksana dengan optimal. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana manajemen BK dalam pengoptimalan peranan personil sekolah untuk kolaborasi pelaksanaan BK disekolah. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan data-data dari hasil penelitian terdahulu dan hasil-hasilnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan BK disekolah harus menerapkan POAC agar personil sekolah mengetahui dan menjalankan perannya, dengan begitu dapat terciptanya kolaborasi personil sekolah dalam pelaksanaan BK yang optimal sesuai dengan kurikulum Merdeka.

ABSTRACT

Collaboration between school personnel is very important in implementing BK management. However, in reality the phenomenon seen in the field is that there are still school personnel who have not carried out their respective roles in providing guidance and counseling services to the maximum. Such as inadequate support for facilities and infrastructure from the school principal, guidance and counseling teachers who do not create programs effectively and efficiently, and subject/class teachers who do not cooperate in sharing information regarding student development patterns in class. In the implementation of management in schools, it is compiled by a curriculum called the independent curriculum. The Merdeka Curriculum emphasizes developing students' individual potential through a more flexible and personalized approach. In this context, the role of guidance and counseling becomes very important to help students overcome various academic and non-academic challenges. Therefore, efforts are needed to increase collaboration between school personnel in BK. So a good management system is needed so that BK services are carried out optimally. Therefore, the aim of this research is to examine in depth how guidance and counseling management works in optimizing the role of school personnel for collaborative implementation of guidance and counseling in schools. The method used in this research is a literature study by collecting data from previous research results and relevant results. The research results show that in implementing BK in schools, POAC must be implemented so that school personnel know and carry out their roles, in this way collaboration between school personnel can be created in implementing optimal BK in accordance with the Merdeka curriculum.

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan satuan pendidikan yang membutuhkan pengelolaan yang baik. Organisasi sekolah sebagai wadah, tempat di mana berlangsungnya berbagai kegiatan baik yang bersifat manajerial, operasional, maupun ketatausahaan. Dalam peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 yang tercantum

pada Bab VII Pasal 49 ayat 1 mengenai Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan berbunyi "Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas."

Istilah manajemen kini telah menjadi kosakata bahasa Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *management*. Kamus itu juga menjelaskan bahwa kata manajemen memiliki dua arti, yaitu (1) proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan, dan (2) pemimpin bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau arahan sekelompok orang. Manajer adalah orang yang mengubah sumber daya manusia atau tenaga kerja, mesin dan uang yang tidak terorganisasi menjadi bisnis yang berguna dan efektif. Manajemen adalah proses di mana sumber daya yang tidak relevan ini diintegrasikan ke dalam seluruh sistem untuk mencapai tujuan. Teori manajemen umum yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir berfokus pada prosedur administrasi dasar. Manajemen diartikan secara sempit sama dengan administrasi yang berarti pengelolaan atau pengaturan.

Diberbagai bidang sangat membutuhkan manajemen dalam mengatur SDM yang ada. Tidak terkecuali bidang Bimbingan dan konseling (BK). Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan layanan penting untuk membantu siswa dalam mencapai perkembangan optimal, baik secara akademik, personal, sosial, maupun karir. Namun, dalam pelaksanaannya, BK dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah manajemen yang buruk, yaitu terlihat dari kurangnya kolaborasi antar personil sekolah. Kurangnya kolaborasi ini dapat menghambat efektivitas layanan BK, sehingga siswa tidak mendapatkan bantuan yang maksimal. Adapun fenomena yang terlihat dilapangan yaitu masih terdapat personil sekolah yang belum melakukan perannya masing-masing dalam pelayanan BK dengan maksimal. Seperti dukungan sarana dan prasarana yang kurang dari kepala sekolah, guru BK yang tidak membuat program dengan efektif dan efisien, dan guru bidang studi/kelas yang tidak bekejasama dalam membagi informasi mengenai pola perkembangan siswa dikelas. Kesuksesan pelayanan BK di sekolah juga didukung oleh program yang terarah, sarana dan prasarana dan dana yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kolaborasi antar peronil sekolah dalam BK. Sehingga diperlukan sistem manajemen yang baik agar pelayanan BK terlaksana dengan optimal. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana manajemen BK dalam pengoptimalan peranan personil sekolah untuk kolaborasi pelaksanaan BK disekolah. Metode

Standar pengelolaan satuan pendidikan pelayanan bimbingan dan konseling berbasis sekolah itu hendaknya didukung oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, para majelis guru dan komite sekolah. Sementara hasil penelitian menunjukkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator BK, wali kelas, guru bidang studi dan staf tata usaha masih ada yang belum melakukan peran masing-masing dalam pelayanan BK dengan maksimal. Hal ini ditunjukkan dari kepala sekolah kurang memberikan dukungan dana dan sarana prasarana yang dapat menghambat pelaksanaan program BK. Lalu untuk koordinator BK sendiri tidak secara efektif dan efisien dalam menyusun program BK. Dan untuk guru-guru kurang dalam menjalin komunikasi yang baik untuk menyampaika informasi mengenai permasalahan atau perkembangan siswa. Untuk itu diperlukan sistem manajemen yang baik agar pelayanan BK terlaksana dengan optimal. Kesuksesan pelayanan BK di sekolah juga didukung oleh program yang terarah serta sarana dan prasarana yang memadai serta tersedianya dukungan dana.

Kesuksesan pelayanan BK di sekolah tentunya harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku disekolah, yaitu kurikulum kerdeka. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dalam proses belajar-mengajar yang memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan individu siswa. Manajemen BK dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa dan merancang program konseling yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sehingga Implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai personil sekolah, termasuk guru, konselor, dan kepala sekolah. Manajemen BK yang baik dapat memfasilitasi komunikasi dan kerja sama di antara personil sekolah untuk mendukung perkembangan siswa secara komprehensif.

Melalui penelitian ini, peneliti melihat dilapangan begitu banyak guru BK yang tidak memberlakukan sistem manajemen yang baik dalam melakukan pelayanan BK, yang mana hal ini menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan layanan BK yang akan diberikan kepada siswa. Adapun hal ini terjadi dikarenakan guru BK masih minim pengetahuan akan prosedur dan langkah-langkah dalam menyusun sistem manajemen yang baik dan rapi. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep manajemen dalam perencanaan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dan permasalahan manajemen bimbingan dan konseling di sekolah sehingga dapat menambah pengetahuan guru BK mengenai bagaimana mengelola manajemen BK di

sekolah yang baik dan benar. Disamping itu juga pentingnya pembahasan ini dilaksanakan peneliti sebagai sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu berupa penelitian kualitatif bersifat studi kepustakaan yaitu dengan melihat dan mengambil referensi dari buku bacaan atau artikel terkait dan disesuaikan dengan topik masalah yang dibahas penulis didalam kajian penelitian. Menurut (Zed, 2004) studi kepustakaan adalah sekumpulan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mereview dan menulis point point penting dari sumber-sumber relevan, bisa itu dari jurnal, buku atau yang lainnya dengan semua itu akan dibuat menjadi bahan penelitian yang dikaji.

Tujuan dari studi kepustakaan ini sendiri menurut (Sari, 2022) adalah (1) Untuk menentukan suatu topik permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian. (2) Mencari informasi serta data yang relevan tentang masalah yang akan diteliti. (3) Mengkaji sebuah teori dasar sesuai dengan topic yang dibahas secara relevan. (4) Menambah pengetahuan peneliti tentang masalah yang akan diteliti nantinya.

Penelitian studi kepustakaan dilakukan dengan cara berikut (Tahmidaten, 2019): 1) menentukan masalah atau subjek penelitian, 2) mengumpulkan informasi atau data terkait dengan topic penelitian, 3) mendefinisikan topik penelitian dan mengawasi data yang terkait, 4) mencari dan mengumpulkan data dari sumber pustaka penting, termasuk buku dan jurnal artikel 5) revisi bahan dan catatan hasil yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, 6) menguraikan informasi yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan yang dimaksudkan untuk membicarakan dan menjawab masalah penelitian, 7) Perluas sumber data untuk membantu validitas analisis data, dan 8) mengorganisasikan hasil penelitian.

Sumber data penelitian ini adalah mengambil dari data yang sudah ada atau dengan kata lain penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan. Dalam studi kepustakaan ini, sumber data ini diperoleh dari beberapa kajian artikel ilmiah yang pernah dilaksanakan. Beberapa sumber diambil dari Google Scholar dengan mengemukakan kata kunci manajemen BK, perencanaan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, permasalahan manajemen bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam studi pustaka ini analisis isi digunakan sebagai metode analisis data. Analisis data adalah proses pemetaan data menjadi format yang lebih mudah dibaca dan dipahami (Sugiono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Manajemen

Manajemen adalah aspek yang esensial untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk organisasi pelayanan BK di sekolah. Melalui pelaksanaan manajemen guru BK/konselor dapat berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kolaborasi untuk mendukung pencapaian tujuan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan BK. Dengan adanya manajemen guru BK/konselor dapat mewujudkan proses belajar yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan sehingga pendidikan berjalan dengan efektif, efisien, mandiri, akuntabel dan potensi peserta didik berkembang. Oleh karena itu, guru BK/konselor perlu mengkaji dan menerapkan manajemen dalam pelayanan BK di sekolah (Octavia, 2019).

Manajemen dapat didefinisikan dalam berbagai cara dan pengertian. Menurut Usman (2013) kata manajemen berasal dari Bahasa Latin, dari asal kata *manus* (tangan), *agree* (melakukan), kata-kata tersebut digabungkan menjadi *managere* (menangani), dalam bahasa Inggris *management* (pengelolaan). Esensi manajemen dapat dipandang sebagai proses (fungsi) dan sebagai tugas (*task*). Manajemen merupakan suatu kerangka kerja yang melibatkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana dalam kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Terry & Rue, 1982).

Di pihak lain, definisi manajemen menurut Oliver Sheldon dalam Ensiklopedia Ilmu Sosial (Sheldon, 1923) adalah sebagai berikut: "Manajemen dapat diartikan sebagai proses melakukan dan mengawasi pelaksanaan suatu tujuan tertentu." Dari beberapa uraian sebelumnya, maka yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu proses kerja sama dan mengupayakan sesuatu hal agar menjadi lebih efektif dan efisien melalui serangkaian pengelolaan yang memfasilitasi kerja/kinerja demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian manajemen pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Usman (2013) adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam (Neviyarni, 2023) manajemen BK dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu dalam pengelolaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien

melalui kegiatan BK. Sumber daya pendidikan tersebut dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi: (1) *man*, (2) *money*, (3) *material*, (4) *machine*, (5) *methods*, (6) *marketing*, (7) *minutes* dan (8) *information*, Lebih khusus lagi bahwa sumber daya pendidikan adalah (1) kepala sekolah, (2) wakil kepala sekolah, (3) wali kelas, (4) pegawai tata usaha, (5) guru mata pelajaran atau guru kelas, (6) laboran, (7) pustakawan, dan (8) personel lainnya. Pengelolaan BK di sekolah harus didukung oleh: (1) guru BK, pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, (2) keuangan sekolah yang memadai, (3) tersedianya ruangan khusus untuk melaksanakan kegiatan BK, (4) tersedianya informasi teknologi untuk melaksanakan *e-counseling* dan komputer untuk data *based* dan pengolahan data, (5) mempunyai metoda *eclectic* (gabungan) dan pendekatan sosiokultural serta perkembangan psikologis peserta didik, (6) kegiatan bimbingan dan konseling harus dipasarkan atau dimasyarakatkan pada peserta didik dan orang tua peserta didik. (7) waktu pelaksanaan BK pelayanan harus didasarkan pada ketersediaan waktu peserta didik, dan (8) mencari informasi yang relevan dalam menghadapi berbagai masalah peserta didik serta pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Pengelolaan bimbingan konseling di sekolah harus: (1) disusun suatu perencanaan yang matang dan komprehensif, (2) diorganisasi dengan baik, (3) dilaksanakan secara bersama dan profesional serta menyenangkan, dan (4) harus dilakukan kontrol atau evaluasi tentang pelaksanaan pelayanan BK di sekolah. Hal ini sesuai dengan proses manajemen sebagai berikut: (1) *planning*. (2) *organizing*, (3) *actuating*, dan (4) *controlling*.

Sekolah merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik. Pengertian pendidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1 adalah pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan siswa belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hakikat pendidikan adalah upaya pembangunan kualitas pribadi manusia dan karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai agama, filsafat, psikologi, sosial budaya, dan iptek yang bermuara pada: (1) pembentukan pribadi manusia yang bermoral, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, (2) sumber daya manusia yang memiliki idealisme nasional, keunggulan profesional dan kompetensi yang bermakna yang dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia (Neviyarni, 2023).

Menurut paham empirisme yang dikemukakan oleh John Locke yang terkenal dengan teori tabula rasa dan ia menganggap peserta didik ibarat kertas putih, maka diisi dan digores oleh guru yang profesional dengan teori stimulus dan respon, serta reward dan punishment. Proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan behavioristik oleh B.F. Skinner. Dalam pandangan ini guru lebih aktif dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan istilah *teaching orientation*. Pendidikan menurut doktrin Jean Jaques Rousseau bahwa pendidikan dipengaruhi oleh tiga memengaruhi proses memengaruhi hal, yaitu: (1) guru, (2) alam, (3) hal-hal lain yang proses pembelajaran. Tiga faktor tersebut pendidikan (Neviyarni, 2023):

Beberapa pandangan ahli terkait pendidikan sebagai berikut ini :

1. Teori realisme religius yang dikemukakan oleh John Amos Comenius (1592-1670) bahwa pendidikan untuk kehidupan dan kebaikan dengan mengikuti proses belajar secara alamiah belajar dengan buku dan disuplementasikan dengan penge luar.
2. Toeri empirisme yang dikemukakan oleh John Locke (1632. 1704) bahwa tidak ada sesuatu yang ada dalam jiwa yang tidak 20. erlebih dahulu pada indra-indra, artinya pendidikan me ngembangkan kemampuan manusia dalam menalar sesuatu
3. Teori naturalisme yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rous- seau (1712-1778) bahwa kebaikan alamiah dari manusia dapat dipelihara dan dilindungi dengan pendidikan dari alam.
4. Teori nasionalisme yang dikemukakan oleh John Herbert (1776. 1841) bahwa pengetahuan ilmiah tentang belajar dan mengajar adalah esensial, jika pendidikan akan melayani kepentingan bangsa dan Negara secara nasional.

Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mendidik dapat dilakukan melalui: (1) pendidikan informal di rumah tangga, (2) pendidikan formal di sekolah, dan (3) pendidikan non formal di masyarakat. Salah satu pembahasan dalam buku ini adalah pendidikan formal di sekolah atau satuan pendidikan. Sekolah sebagai suatu sistem sosial perlu dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang berkualitas.

Kinerja sekolah sebagai sistem sosial dapat ditinjau dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 juncto PP No. 32 Tahun 2013 dan diperbaharui kedua dengan PP No. 13 Tahun 2015 tentang 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan (4) standar pendidik dan tenaga pendidikan, (5) standar pengelolaan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) standar penilaian, dan (8) standar pembiayaan.

Sekolah merupakan satuan pendidikan yang membutuhkan pengelolaan yang baik. Organisasi sekolah sebagai wadah, tempat di mana berlangsungnya berbagai kegiatan baik yang bersifat manajerial, operasional, maupun ketatausahaan. Dalam peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 yang tercantum pada Bab VII Pasal 49 ayat 1 mengenai Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan berbunyi "Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas."

Beberapa perubahan perilaku manajerial sekolah diprediksi sebagai berikut: (1) dari mereduksi pengeluaran ke merangsang pendapatan, (2) dari membelanjakan ke menghasilkan, (3) dari perilaku ketergantungan ke perilaku independensi, (4) dari pemecahan masalah secara inkremental ke pemecahan masalah secara bersistem, (5) dari berpikir vertikal ke berpikir lateral, (6) dari berwawasan kekinian menjadi berwawasan ke depan, (7) dari birokratisasi prosedur kerja ke penyederhanaan prosedur kerja, (8) dari egosentrisme ke pemahaman kolektif, (9) dari mengarahkan ke mengayuh, (10) dari melayani ke memberi wewenang, (11) dari monopoli ke kompetitif, (12) dari digerakkan oleh peraturan ke digerakkan oleh misi, (13) dari tindakan kuratif ke tindakan preventif, (14) dari hubungan pola klien ke hubungan ke sejawatan, dan (15) dari menerima perubahan ke mendongkrak perubahan (Neviyarni, 2023).

Secara konseptual pemberdayaan personel sekolah memperoleh keuntungan baik secara individu maupun konseptual dapat dimuat sebagai berikut (1) peluang untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian bagi peningkatan mutu layanan, (2) memasarkan keterampilan baru dan beragam pengalaman yang ada, (3) meningkatkan motivasi, rasa berprestasi, dan perluasan tugas secara signifikan, (4) meningkatkan etos kerja yang memiliki dampak positif bagi produktivitas, dan (5) mereduksi stress bekerja di kalangan staf. Pemberdayaan sumber daya sekolah merupakan optimalisasi sekolah menuju otonomi sekolah (Usman, 2013).

Standar pengelolaan satuan pendidikan pelayanan bimbingan dan konseling berbasis sekolah itu hendaknya didukung oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, para majelis guru dan komite sekolah. Sementara hasil penelitian menunjukkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator BK, wali kelas, guru bidang studi dan staf tata usaha masih ada yang belum melakukan peran masing-masing dalam pelayanan BK dengan maksimal. Untuk itu diperlukan sistem manajemen yang baik agar pelayanan BK terlaksana dengan optimal. Kesuksesan pelayanan BK di sekolah juga didukung oleh program yang terarah serta sarana dan prasarana yang memadai serta tersedianya dukungan dana (Neviyarni, 2023).

Istilah manajemen kini telah menjadi kosakata bahasa Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *management*. Kamus itu juga menjelaskan bahwa kata manajemen memiliki dua arti, yaitu (1) proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan, dan (2) pemimpin bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi (Neviyarni, 2023).

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau arahan sekelompok orang. Manajer adalah orang yang mengubah sumber daya manusia atau tenaga kerja, mesin dan uang yang tidak terorganisasi menjadi bisnis yang berguna dan efektif. Manajemen adalah proses di mana sumber daya yang tidak relevan ini diintegrasikan ke dalam seluruh sistem untuk mencapai tujuan. Teori manajemen umum yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir berfokus pada prosedur administrasi dasar. Manajemen diartikan secara sempit sama dengan administrasi yang berarti pengelolaan atau pengaturan (Handoko, 1997).

Manajemen didefinisikan sebagai pengaturan terhadap hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan melalui fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, controlling*, serta melalui administrasi, yaitu *men, method, money, material, machine, market, minutes, and information*. Hubungan antara manajemen, organisasi, administrasi, terletak dalam proses kerja sama di dalam organisasi dan membutuhkan upaya yang efektif dan efisien untuk mendukung optimalisasi tujuan. Dalam hal ini, manajemen dan administrasi adalah alat, sarana yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kolaboratif untuk mendukung realisasi tujuan organisasi yang dioptimalkan (Neviyarni, 2023).

Fungsi Manajemen

Menurut Handoko (1997) fungsi manajemen adalah:

1. Fungsi perencanaan (*planning*). Koordinator BK sekolah harus menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang terkait dengan rencana BK.

2. Fungsi organisasi (organization). Koordinator BK mengklasifikasikan kegiatan penting, menentukan kegiatan penting, dan memberikan wewenang kepada orang tertentu (guru BK/guru kelas) untuk melakukan kegiatan tersebut.
3. Fungsi pelaksanaan (actualing). Koordinator BK harus mendorong kinerja guru BK melalui motivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai rencana.
4. Fungsi pengawasan (controlling). Supervisi dilakukan oleh penanggungjawab dan supervisor di bidang BK, kemudian koordinator BK juga menggunakan supervisi Manajemen administrasi yaitu: men (sumber daya manusi/pesonel), material (bahan-bahan), machines (peralatan, sarana dan prasarana), method (metode/layanan) money (sumber dana) market (peserta didik), dan minute (waktu). Disamping itu, juga ditambah dengan information (informasi) tentang berbagai hal yang terkait dengan pengawasan.

Syarat Manajemen

Membahas kebutuhan manajemen tentunya tidak terlepas dari konsep dasar manajemen secara umum, terutama fungsi manajemen, karena pimpinan atau manajer harus melalui rangkaian acara, seperti perencanaan, pengorganisasian, penataan personel dan pengalaman. Adapun mengawasi lebih memperhatikan tujuan, orang-orang yang bekerja/upaya untuk mencapai tujuan tersebut, serta sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan tersebut.

Ada 2 komponen dalam kegiatan pengelolaan sekolah, yaitu: (1) faktor manusia seperti peserta didik, orang tua, guru dan pegawai dan pekerja lainnya, wakil kepala sekolah/pengajaran, dan wakil kepala sekolah bidang sekolah. Penanggung jawab KEMENDIKBUD dan individu lain dalam masyarakat; (2) Unsur material seperti uang, bangunan, tanah, peralatan dan alat belajar; gagasan, prinsip, hukum, peraturan, kebutuhan masyarakat, kebutuhan dll. Dalam pelaksanaan pelayanan pelayanan BK kedua unsur tersebut dikelola untuk menyelenggarakan program BK secara efektif dan efisien Neviyarni (2023).

Organisasi dan Personalia

1. Organisasi

Organisasi organisasi adalah suatu sistem di mana orang-orang dalam suatu kelompok saling memengaruhi, dan kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut ditemukan sebuah organisasi yang dapat menghasilkan tiga faktor, yaitu: (1) personel, (2) kerja sama, dan (3) tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain/ada secara terpisah, tetapi terkait satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, dalam pengertian organisasi, sistem terminologi digunakan untuk meng- ungkapkan kelancaran berbagai faktor yang diatur oleh berbagai prinsip ditentukan oleh masing-masing organisasi (Octavia, 2019).

Organisasi layanan BK yang dibentuk di sekolah harus mem- pertimbangkan sumber daya yang tersedia, ukuran sekolah, jumlah peserta didik dan jumlah guru BK, dan bagaimana menyesuaikan kualifikasi sekolah, nilai atau jabatan atau pembagian kerja. Menurut pengaturannya. Organisasi layanan BK meluas secara ver- tikal dari pelaksana tingkat terendah dan asisten pelaksana, sedangkan organisasi horizontal mencakup personel yang dapat mempromosikan penyampaian layanan BK yang stabil dan berkelanjutan. Organisasi yang mengandung unsur vertikal dan hori- zontal harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan, seperti: kom- prehensif, sederhana, fleksibel dan terbuka, menjamin kerja sama, memastikan terlaksananya pengawasan, awasan, evaluasi dan tindak lanjut kerja.

Adapun langkah-langkah dalam menjalankan suatu organisasi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dica- pai, apakah itu motivasi atau motivasi pelayanan.
 - b. Menentukan kegiatan artinya manajer harus memahami, merumuskan dan menentukan kegiatan yang diperlukan un- tuk mencapai tujuan organisasi, serta menyusun daftar kegiat- an yang akan dilakukan.
 - c. Kegiatan kelompok, yaitu kegiatan kelompok yang didasarkan pada tujuan yang sama. Aktivitas dengan kesamaan dan hu- bungan diintegrasikan menjadi satu atau sebagian.
 - d. Pendelegasian wewenang, yaitu manajer harus menentukan jumlah otorisasi yang akan didelegasikan ke setiap departemen.
 - e. Rentang kendali, yaitu manajer harus menentukan jumlah karyawan di setiap departemen.
 - f. Peranan perorangan, yaitu manajer dengan jelas mendefini- sikan pekerjaan setiap orang.
 - g. Tipe organisasi, yaitu manajer menentukan jenis organisasi yang akan digunakan (organisasi langsung, organisasi lang- sung dan karyawan, organisasi fungsional).
 - h. Struktur, yaitu manajer menentukan jenis organisasi yang akan digunakan (organisasi langsung, organisasi langsung dan karyawan, organisasi fungsional) (Neviyarni, 2023).
- #### 2. Personalia

Menurut pandangan Herber G. Kicks, faktor inti dari suatu organisasi adalah personel (personel) sebagai faktor pembentuk organisasi, dan faktor kerja yang menentukan jalannya organisasi adalah manusia (kemampuan). Bekerja, memengaruhi kemampuan orang), kemampuan lain untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip organisasi dan sumber daya manusia lainnya, seperti alam, iklim, dll. Dari segi bisnis, pelaksana utama pelayanan BK di sekolah adalah guru BK dan koordinator pembinaan, namun diharapkan personel sekolah lainnya juga berperan agar rencana pembinaan dapat terlaksana dengan baik. Personel sekolah meliputi: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, peserta didik kependidikan, komite sekolah, koordinator BK, pengawas BK, peserta didik, tenaga administrasi, orang tua peserta didik, aparat keamanan (satpam) dan petugas kebersihan Neviyarni (2023).

Program

Program BK adalah satuan besar dan kecil BK mendukung kegiatan dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Rencana BK adalah isi dari semua organisasi BK di sekolah. Pembangunan program-program ini harus memperhitungkan mode BK umum dan berbagai kondisi di lokasi. Setiap satuan pendidikan atau sekolah perlu mengembangkan rencana BK sebagai bagian integral dari keseluruhan rencana sekolah. Rencana ini dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan BK di masing-masing sekolah.

Ada dua rencana yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan program yaitu:

1. Rencana Tahunan Sekolah Rencana ini disusun sesuai dengan alokasi waktu, seperti rencana semester, rencana bulanan bahkan rencana mingguan. Prosedur tersebut mencakup sifat kegiatan, jenis layanan yang dialokasikan menurut waktunya.
2. Rencana pembagian tugas sekolah, merencanakan kegiatan pelayanan untuk masing-masing guru BK.

Pelayanan BK merupakan kegiatan profesional, sehingga perlu direncanakan sedemikian rupa agar membuahkan hasil yang efektif dan optimal. Berdasarkan hasil pengembangan sistem informasi BK, aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi guru BK dalam merencanakan pelayanan yang akan diberikan kepada peserta didik. Hal ini menunjukkan pelayanan BK dapat mengalami kemajuan dengan adanya pemanfaatan teknologi sehingga kegiatan tersebut berdampak terhadap peningkatan perkembangan peserta didik (Wahida, 2019).

Fasilitas

Menurut Neviyarni (2023) dalam rangka melaksanakan pelayanan BK semaksimal mungkin, selain membentuk dan mengelola organisasi dengan baik serta menugaskan personel sesuai dengan kemampuan masing-masing, diperlukan beberapa sarana dan prasarana atau sarana untuk mendukung terlaksananya pelayanan BK yang benar dan efektif. Sarana dan prasarana BK merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Karena pelayanan BK merupakan bagian dari pendidikan sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad dan Hasan (2002), untuk kelancaran pelaksanaan program BK diperlukan prasarana dan sarana yang memadai dengan menyediakan dan mengatur ruangan dengan baik sehingga peserta didik mendapat pelayanan secara menyeluruh dan dicapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan layanan BK.

Sarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan BK sebagai berikut (Neviyarni, 2023).

1. Instrumen pengumpulan data
2. Perangkat penyimpanan data
3. Perlengkapan teknis
4. Beberapa alat perlengkapan administrasi bimbingan yang perlu disediakan di ruang bimbingan, yaitu: blangko surat-surat, kartu laporan konseling, catatan konferensi kasus, keterangan pemberian layanan, buku tamu, kotak masalah, kotak masalah dan papan pengumuman.

Menurut pedoman pelayanan BK berbasis kompetensi, sarana BK juga merupakan perangkat elektronik, seperti pada gambar di bawah ini (Neviyarni, 2023).

1. Komputer yang memproses data dari aplikasi meteran
2. Program khusus mengolah hasil tes melalui komputer
3. Melaksanakan program khusus BK melalui komputer, seperti pembinaan melalui program komputer.

Sementara itu, infrastruktur merupakan perlengkapan fisik yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan BK. Prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pelayanan BK sebagai berikut (Neviyarni, 2023).

1. Ruang kerja guru BK
2. Ruang konseling
3. Ruang tunggu/ruang tamu
4. Ruang perlengkapan/dokumentasi
5. Ruang bimbingan kelompok.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program mengacu pada tanggung jawab atas hasil kegiatan BK yang telah dilaksanakan. Hal ini terkait erat dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya, dan juga terkait dengan sistem pertanggungjawaban proses terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Sistem pertanggungjawaban perencanaan sangat penting menjadi perhatian para guru BK dan konselor, karena sebelum melakukan berbagai kegiatan konsultasi, guru BK harus memahami kinerja dan hal-hal yang akan menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan standar perencanaan BK, sehingga adanya kinerja komunitas BK yang bertanggung jawab.

Guru BK perlu mengatur kursus sesuai dengan kebutuhan pe- serta didik. Adanya prosedur yang sistematis memerlukan per- timbangan kondisi tertentu, dan kondisi tersebut memerlukan suatu standar untuk mengukur keberhasilan atau prestasi guru BK. Kegiatan pelaksanaan organisasi meliputi hal-hal sebagai berikut, maka tanggung jawab manajemen organisasi.

1. Tentukan tujuan yang benar
2. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut
3. Secara efektif mempromosikan adopsi penggunaan standar
4. Merumuskan standar organisasi dan operasional secara efektif, ekonomis dan efisien.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas BK yang telah di- sepakati, diperlukan layanan bimbingan dan konsultasi yang baik, benar, efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Jika sistem pertanggungjawaban atau sistem pertanggungjawaban BK dilaksanakan secara ber- kala dan memenuhi ketentuan atau regulasi yang berlaku, maka keberadaan BK tentunya menjadi kebutuhan dasar yang harus diutamakan dalam kehidupan masyarakat khususnya di lingkungan sekolah Neviyarni (2023).

Kepengawasan Pengembangan

Pengawasan manajemen adalah pekerjaan yang sistematis. Tujuannya untuk menetapkan standar implementasi dengan tujuan yang direncanakan, merancang sistem umpan balik, dan kegiatan aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan dan mengukur reservasi dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif dan efektif.

Pengawasan kegiatan BK diselenggarakan oleh pengawas sekolah dengan tugas pokok mengadakan pembinaan terhadap pe- laksanaan kegiatan BK dan pembinaan terhadap guru BK melalui pemberian arahan, bimbingan, contoh, dan saran kepada guru BK untuk meningkatkan mutu pelaksanaan BK di sekolah. Dengan demikian perlu ditingkatkan kompetensi para pengawas yaitu: (1) Kompetensi kepribadian, (2) kompetensi sosial, (3) kompe- tensi supervisi akademik, (4) kompetensi supervisi manajerial, (5) kompetensi evaluasi dan penilaian, dan (6) kompetensi penelitian dan pengembangan (Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Kompetensi Pengawas Sekolah). Untuk itu, 1 orang pengawas BK bertanggung jawab membina 40 orang guru BK. Sesudah itu, 1 orang guru BK bertanggung jawab melaksanakan pelayanan BK terhadap peserta didik sebanyak 150 orang dalam 1 minggu. Kegiatan supervisi BK di sekolah melibatkan pendidikan langsung dan interaksi dinamis antara guru BK dengan pengawas sekolah di bidang BK, dan dikoordinasikan oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, berbagai pihak terkait perlu melakukan operasi berikut ini.

1. Guru BK dan pengawas sekolah perlu memiliki wawasan yang selaras dengan konsep BK dan pelaksanaan kegiatan BK di sekolah
2. Guru BK menyiapkan bahan untuk kegiatan supervisi peng- awas sekolah di bidang BK
3. Guru BK mengikuti evaluasi dan bimbingan dengan cermat dalam kegiatan supervisi
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas BK, kepala sekolah mendorong dan memberikan fasilitas kegiatan pengawasan yang objektif dan dinamis

Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan BK secara objektif yang dilakukan secara berkala an terus menerus diharapkan meningkatkan mutu pelayanan BK. Pengawasan yang langsung berasal dari program studi BK dapat mengatasi permasalahan dan dapat meningkatkan profesionalitas guru BK dalam melaksanakan pelayanan BK secara komprehensif Neviyarni (2023).

Permasalahan Manajemen BK dan Solusinya

Permasalahan yang muncul antara lain yang berkaitan dengan konsep manajemen. Solusi masalah dianggap bermanfaat untuk menyelesaikan masalah manajemen, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme manajemen harus mengikuti model manajemen standar yang ada yang sesuai dengan tujuan organisasi
2. Memberikan pelatihan manajemen untuk personel sekolah
3. Merupakan tujuan yang tepat dari segi proses atau model manajemen untuk memberikan nilai tambah di sekolah Neviyarni (2023)

Permasalahan yang timbul di sekolah berkaitan dengan manajemen BK dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut Neviyarni (2023):

NO	Masalah	Solusi
1	Pengelolaan/manajemen BK di sekolah belum banyak memberikan nilai tambah bagi sekolah	Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, guru kelas dan guru mata pelajaran dapat bekerja sama dengan guru BK untuk secara efektif melaksanakan layanan BK di sekolah
2	Dalam hal penempatan personalia, masih ada guru BK dari jurusan lain, sehingga guru BK belum tahu harus berbuat apa.	Kepala sekolah tidak menugaskan guru yang bukan berlatarbelakang pendidikan BK untuk menjadi guru BK. Bila terjadi kekurangan guru BK yang berlatarbelakang BK, maka guru tersebut harus mengikuti pelatihan dan workshop tentang BK serta mengikuti pelatihan pertemuan musyawarah guru BK
3	Masih terdapat ketimpangan antara guru BK dengan peserta didik asuhnya, sehingga guru BK belum dapat menjalankan tugasnya secara maksimal	Kepala sekolah dapat mengangkat guru BK dengan latar belakang pendidikan BK yang dibayarkan honorinya melalui dana BOS atau dana komite sekolah
4	Manajemen BK hanya dipahami oleh segelintir orang saja di sekolah, oleh karena itu pola manajemen di sekolah masih bersifat pragmatis-praktis.	Pengawasan BK dan kepala sekolah dapat mensosialisasikan tentang pemahaman BK di sekolah secara holistik

Bimbingan Konseling dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Manajemen BK di sekolah berfungsi sebagai koordinator yang memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui kerja sama dengan guru mata pelajaran, penggunaan teknologi, dan evaluasi yang terus-menerus. Hal ini memungkinkan guru BK untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam implementasi kurikulum merdeka. Berikut akan dijabarkan bagaimana penerapan BK sesuai kurikulum merdeka (Fitriani : 2023).

1. Koordinasi dengan Guru Mata Pelajaran

Guru BK dan guru mata pelajaran berkolaborasi untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Guru BK memberikan layanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, sementara guru mata pelajaran memberikan bantuan dalam memahami karakteristik peserta didik dan menyesuaikan strategi pembelajaran.

2. Kerja Sama dengan Lintas Mata Pelajaran

Guru BK berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, seperti pendidikan agama Islam dan kewarganegaraan, untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

3. Evaluasi dan Refleksi

Guru BK dan manajemen sekolah melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau dan menyesuaikan implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini membantu dalam mengatasi tantangan yang timbul dan meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling.

SIMPULAN

Manajemen BK yang baik sangat penting untuk mengoptimalkan peranan personil sekolah dalam pelaksanaan BK yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Diperlukan peningkatan pengetahuan dan kolaborasi antar personil sekolah untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas layanan BK di sekolah. Adapun hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan BK di sekolah harus menerapkan Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC) agar personil sekolah mengetahui dan

menjalanka perannya, dengan begitu dapat terciptanya kolaborasi personil sekolah dalam pelaksanaan BK yang optimal.

REFERENSI

- Handoko, T. H. (1997). *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Fitriani. (2023). Analisis Implementasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Di Smp. *BIKONS: Jurnal Bimbingan Konseling*. Vol 3(3) 1-19.
- Neviyarni. (2023). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Usman, H. (2013). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Octavia, S. A. (2019). *Bimbingan konseling di sekolah / madrasah*. Bandung: CV BUDI UTAMA
- Sari, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian. Global Eksekutif Teknologi*. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi
- Sheldon, O. (1923). *The Philosophy of Management*. London: Pitman
- Sugiono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahmidaten, L. &. (2019). Implementasi Pendidikan Kebencanaan Di Indonesia (Sebuah Studi Pustaka Tentang Problematika dan Solusinya). *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 10(2), 136-154.
- Terry, G. R., & Rue, L.W. (1982). *A guide to supervision. Learningys tems Company*. New York: Homewood.
- Wahida, N. C. (2019). Peran dan Aplikasi Assesment dalam Bimbingan dan Konseling. *FOKUS (Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan)*, 2(2) 45-56.
- Zed, M. (2004). *Metode Peneletian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia .